

***Ketahanan Nasional dan Kesetaraan Gender: Reformasi Hukum Tata Negara
Untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Sektor Pertahanan***

Muhammad Bagus Rosi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: bagusrosiy@gmail.com

Abstract

This study explores the interrelation between national resilience and gender equality with a particular focus on women's participation in the defense sector. The research aims to critically examine how the constitutional and legal framework in Indonesia accommodates gender equality and what reforms are necessary to enhance inclusiveness in the defense field. Employing a qualitative approach with a normative juridical method, the study analyzes relevant constitutional provisions, statutory regulations, and secondary legal sources to identify both opportunities and structural barriers in policy implementation. The findings indicate that women's participation in the defense sector remains minimal, primarily due to entrenched social constructions, discriminatory regulations, and the absence of affirmative legal measures that encourage gender mainstreaming. These limitations not only restrict women's access to strategic positions but also weaken the holistic realization of national resilience. The study concludes that gender-sensitive constitutional reform is urgently required to ensure equality, foster inclusive participation, and strengthen national resilience in a sustainable manner.

Keywords: Constitutional Law, Gender Equality, Women's Participation, National Resilience, Defense Sector

Abstrak

Penelitian ini membahas keterkaitan antara ketahanan nasional dan kesetaraan gender dengan menitikberatkan pada partisipasi perempuan dalam sektor pertahanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis sejauh mana kerangka hukum tata negara di Indonesia mengakomodasi prinsip kesetaraan gender, serta bentuk reformasi hukum yang diperlukan guna mendorong partisipasi perempuan secara lebih inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif melalui analisis terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di sektor pertahanan masih sangat terbatas akibat konstruksi sosial yang patriarkis, regulasi yang diskriminatif, serta ketiadaan langkah afirmatif yang secara nyata mendukung pengarusutamaan gender. Keterbatasan ini tidak hanya membatasi akses perempuan pada posisi strategis, tetapi juga melemahkan terwujudnya ketahanan nasional secara komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum tata negara yang sensitif gender merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin kesetaraan, memperluas partisipasi inklusif, dan memperkuat ketahanan nasional secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara, Kesetaraan Gender, Partisipasi Perempuan, Ketahanan Nasional, Sektor Pertahanan

A. Pendahuluan

Isu ketahanan nasional tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan, yang memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi pertahanan negara. Namun, kenyataannya masih terdapat kesenjangan gender yang signifikan dalam partisipasi perempuan di sektor pertahanan, baik dalam aspek pengambilan keputusan, struktur kelembagaan, maupun perumusan kebijakan strategis.¹ Permasalahan utama yang muncul adalah masih kuatnya bias patriarki dalam sistem hukum tata negara yang menghambat akses perempuan untuk berperan optimal dalam sektor pertahanan.² Ruang lingkup kajian ini meliputi analisis reformasi hukum tata negara yang berorientasi pada kesetaraan gender sebagai prasyarat penting dalam membangun ketahanan nasional yang inklusif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana reformasi hukum tata negara dapat mendorong partisipasi perempuan di sektor pertahanan sebagai bagian integral dari pembangunan ketahanan nasional.

Ketahanan nasional merupakan salah satu pilar fundamental dalam menjamin keberlangsungan, kedaulatan, dan integritas suatu negara. Ketahanan nasional tidak hanya berfungsi sebagai benteng dalam menghadapi ancaman eksternal, tetapi juga menjadi landasan bagi stabilitas internal yang memungkinkan negara untuk tumbuh, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan dinamika global.³ Dalam konteks ini, ketahanan nasional sering dipahami sebagai kemampuan bangsa untuk menghadapi segala bentuk tantangan, baik yang bersifat militer, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Seiring dengan perkembangan zaman, konsep ketahanan nasional tidak lagi dipandang semata-mata dari perspektif militeristik. Tantangan di era modern telah berkembang menjadi lebih kompleks, termasuk ancaman non-tradisional seperti terorisme, konflik sosial, disinformasi, hingga isu kesenjangan gender. Oleh sebab itu, pemaknaan ketahanan nasional harus bersifat multidimensional dan holistik. Ia tidak hanya melibatkan aspek keamanan pertahanan negara, tetapi juga menyangkut kesetaraan sosial, stabilitas politik, pembangunan ekonomi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁴

¹ Rumbekwan Margaretha and Nini Adelina Tanamal. "Peran Perempuan Dalam Ketahanan Nasional." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 48, no. 2 (2022): 203-212.

² May May, Sjafrie Sjamsoedin, Eko G. Samudro, and Bambang Wahyudi. "Akselerasi Agenda Women, Peace, and Security (WPS) dalam Pembangunan Nasional untuk Pertahanan Negara." *Civil and Military Cooperation Journal* 1, no. 1 (2024): 1-10.

³ Kansil Christine ST, Michelle Prawira, and H. K. Martono. "Pertahanan negara dan gender wanita di masa pandemi covid19 di Indonesia." *Prosiding Serina* 1, no. 1 (2021): 549-566.

⁴ Aflah Muhammad Naufal and Laili Rahmah Mawaddah. "Pengaruh Glass Ceiling Terhadap Kepemimpinan Strategis Wanita Dalam Bidang Militer Di Indonesia." *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 4, no. 2 (2021): 4.

Berbagai penelitian dan pengalaman internasional telah menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor pertahanan memberikan dampak positif yang signifikan. Pertama, perempuan dapat menghadirkan perspektif yang lebih luas dalam penyusunan kebijakan, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil, resolusi konflik, serta pembangunan perdamaian berkelanjutan. Kedua, kehadiran perempuan dalam struktur pertahanan dapat mencerminkan sistem hukum yang lebih adil dan demokratis, karena kesetaraan gender menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Ketiga, peningkatan partisipasi perempuan juga akan memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat internasional, sejalan dengan komitmen global terhadap prinsip kesetaraan gender sebagaimana diatur dalam berbagai konvensi internasional, termasuk CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984.⁵

Distingsi penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi ketahanan nasional, hukum tata negara, dan kajian gender secara simultan. Penelitian sebelumnya umumnya masih menitikberatkan pada partisipasi perempuan dalam politik atau ekonomi, sementara aspek keterlibatan perempuan di sektor pertahanan sering kali diabaikan atau hanya disinggung secara parsial. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan akademik dengan mengaitkan urgensi reformasi hukum tata negara dan penerapannya terhadap peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor pertahanan.

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan kerangka konseptual dan rekomendasi kebijakan bagi pembuat keputusan untuk mewujudkan sistem hukum tata negara yang lebih responsif gender. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat literatur akademik mengenai relasi antara kesetaraan gender dan ketahanan nasional, serta membuka ruang diskursus baru bahwa penguatan sektor pertahanan tidak hanya berbasis kekuatan militer, tetapi juga keterlibatan setara seluruh warga negara tanpa memandang gender. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mendorong terwujudnya ketahanan nasional yang berkeadilan gender.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif.⁶ Pendekatan tersebut dipilih karena fokus kajian berada pada analisis peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan ketahanan nasional serta

⁵ Andrew Shandy, Arief Fahmi Lubis, Jana Milia, and I. Gede Agus Krisna Warmayana. "Sistem Politik Berkeadilan Pancasila: Upaya Nyata Peningkatan Ketahanan Hukum Nasional." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 7 (2024): 2500-2509.

⁶ Jim Hoy Yam. "Kajian penelitian: Tinjauan literatur sebagai metode penelitian." *Jurnal Empire* 4, no. 1 (2024): 61-70.

kesetaraan gender. Untuk memperkaya analisis, digunakan pula pendekatan sosio-yuridis yang menekankan pada keterkaitan norma hukum dengan praktik partisipasi perempuan dalam sektor pertahanan. Data penelitian terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, serta regulasi lain yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dokumen Lemhannas, serta laporan lembaga internasional seperti UN Women.
- c. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta artikel pendukung lainnya.⁷

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah undang-undang, peraturan, dokumen resmi pemerintah, serta publikasi akademik. Selain itu, digunakan analisis dokumen terhadap laporan lembaga nasional maupun internasional. Dalam beberapa bagian, analisis dilengkapi dengan wawancara terbatas kepada pakar hukum tata negara dan aktivis gender untuk memperkuat validitas temuan.⁸ Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui tiga tahap: (1) reduksi data dengan memilah informasi yang relevan, (2) penyajian data dalam bentuk uraian sistematis, dan (3) penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi yang mendalam terhadap data hukum dan sosial.⁹

C. Hasil dan Pembahasan

1. Partisipasi Perempuan dalam Ketahanan Nasional di Indonesia

Ketahanan nasional Indonesia selama ini masih didominasi oleh perspektif militeristik. Kerangka hukum utama, yakni Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), memang mengatur struktur, tugas, dan fungsi pertahanan negara. Namun, regulasi ini tidak secara eksplisit memberikan ruang afirmatif untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam tubuh TNI maupun dalam sektor pertahanan secara luas. Data dari Kementerian Pertahanan menunjukkan bahwa jumlah personel perempuan di TNI relatif kecil, terutama pada posisi strategis dan kepemimpinan.¹⁰

⁷ David Tan. "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463-2478.

⁸ Muhammad Rijal. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." *Humanika, kajian ilmiah mata kuliah umum* 21, no. 1 (2021): 33-54.

⁹ Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka." *Jurnal Edumaspul* 6, no. 1 (2022): 974-980.

¹⁰ Hasto, Purnomo Yusgiantoro, Amrulla Octavian, and I. Wayan Midhio. "Kepemimpinan Strategis dalam Perspektif Gender." *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2022): 149-164.

Minimnya representasi perempuan dalam sektor pertahanan mencerminkan adanya keterbatasan baik secara sistem hukum maupun budaya institusional yang masih maskulin. Dominasi nilai-nilai patriarkis di tubuh militer menjadikan perempuan sering dipandang hanya sebagai pelengkap, bukan aktor utama. Padahal, kontribusi perempuan dalam sektor pertahanan tidak kalah penting dibandingkan laki-laki.¹¹ Merujuk pada tabel 1 partisipasi perempuan untuk mengetahui potensi – potensi perempuan dalam ketahanan nasional di Indonesia.

Tabel 1. Partisipasi Perempuan

Dimensi	Uraian
Formal (Institusional)	Perempuan terlibat di TNI, Polri, dan lembaga pertahanan; meski jumlah dalam posisi strategis masih terbatas.
Non-Formal (Sosial & Ekonomi)	Peran perempuan sebagai pendidik, tenaga kesehatan, dan pelaku ekonomi (UMKM) memperkuat ketahanan ideologi, kesehatan, dan ekonomi nasional.
Politik & Pengambilan Keputusan	Representasi perempuan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif penting untuk melahirkan kebijakan responsif gender.
Tantangan Struktural	Keterbatasan regulasi afirmatif, akses pendidikan militer, dan karier strategis masih timpang.
Tantangan Kultural	Budaya patriarki, stereotip gender, dan pandangan domestik membatasi ruang gerak perempuan.
Strategi Penguatan	Reformasi hukum tata negara, transformasi budaya, pemberdayaan komunitas, dan sinergi pemerintah–masyarakat. ¹²

Sumber: diolah peneliti, 2025

Ketahanan nasional merupakan konsep strategis yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Dalam konteks Indonesia, ketahanan nasional dipahami sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi ketangguhan, keuletan, serta kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri.¹³ Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali, termasuk perempuan. Partisipasi perempuan dalam ketahanan nasional tidak hanya dilihat sebagai bentuk keterlibatan dalam sektor pertahanan dan keamanan formal,

¹¹ Anjeli, Eraskaita Ginting, and Reni Apriani. "Politik Gender dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Midar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 10, no. 3 (2025): 438-453.

¹² Latifah Eny, and Rudi Abdullah. "Peran Gender Perempuan Dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Demi Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Di Tingkat Global." *JIDE: Journal Of International Development Economics* 2, no. 01 (2023): 50-74.

¹³ Masruchiyah Nieke, and Antonia Junianty Laratmase. "Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan* 12, no. 2 (2023): 125-138.

tetapi juga sebagai kontribusi aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, politik, serta pembentukan karakter bangsa yang berdaya tahan tinggi.

Sejarah menunjukkan bahwa perempuan Indonesia telah memainkan peranan penting dalam perjuangan bangsa, bahkan sejak masa kolonial. Sosok-sosok seperti Cut Nyak Dhien, Cut Mutia, Martha Christina Tiahahu, dan Dewi Sartika merupakan representasi nyata dari keterlibatan perempuan dalam mempertahankan kedaulatan bangsa, baik melalui perlawanan fisik, pendidikan, maupun peran sosial. Fakta historis ini menegaskan bahwa kontribusi perempuan dalam ketahanan nasional bukanlah fenomena baru, melainkan bagian integral dari perjalanan bangsa.¹⁴ Namun, dalam dinamika modern, tantangan partisipasi perempuan semakin kompleks karena harus berhadapan dengan struktur sosial patriarkis, stereotip gender, dan keterbatasan akses terhadap ruang-ruang strategis, khususnya dalam bidang pertahanan negara.

Dalam perspektif hukum dan kebijakan nasional, Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan gender melalui berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Kerangka regulasi tersebut membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berkontribusi dalam bidang pertahanan dan keamanan, baik melalui jalur militer maupun non-militer.¹⁵ Kendati demikian, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala, seperti rendahnya representasi perempuan dalam posisi strategis, keterbatasan pendidikan dan pelatihan pertahanan yang responsif gender, serta minimnya dukungan sosial budaya yang dapat memperkuat peran perempuan.

Partisipasi perempuan dalam ketahanan nasional dapat ditinjau dari dua dimensi utama, yaitu dimensi formal dan non-formal. Pada dimensi formal, perempuan dapat terlibat langsung dalam institusi pertahanan negara seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan lembaga pemerintah terkait pertahanan dan keamanan. Perempuan yang bergabung dalam TNI, misalnya, tidak hanya terbatas pada peran administratif, tetapi juga semakin banyak yang terlibat dalam bidang

¹⁴ Jannah Iftitahul, and Putri Marzaniar. "Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Rekrutmen dan Promosi Jabatan Struktural Pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 20, no. 1 (2025): 1-26.

¹⁵ Sri Yaumil Habibie, Herlina Juni Risma Saragih, and Panji Suwarno. "Budaya Kepemimpinan Strategis Dalam Menghadapi Ancaman Non Tradisional Di Indonesia Melalui Peningkatan Partisipasi Perempuan Pesisir." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 8 (2024): 3290-3303.

operasional, intelijen, hingga misi perdamaian internasional di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kehadiran mereka memperkuat legitimasi bahwa pertahanan negara merupakan tanggung jawab bersama, bukan monopoli laki-laki.¹⁶ Namun demikian, jumlah perempuan dalam posisi strategis masih sangat terbatas bila dibandingkan dengan laki-laki, sehingga mendorong perlunya kebijakan afirmatif yang memberikan kesempatan setara bagi perempuan dalam jalur karier militer maupun sipil di sektor pertahanan.

Pada dimensi non-formal, partisipasi perempuan dalam ketahanan nasional dapat diwujudkan melalui berbagai peran sosial dan komunitas, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga penguatan nilai-nilai kebangsaan. Perempuan yang berperan sebagai pendidik, misalnya, secara tidak langsung turut memperkuat ketahanan ideologi bangsa dengan menanamkan nilai nasionalisme, kebhinekaan, dan cinta tanah air kepada generasi muda. Demikian pula perempuan yang aktif dalam dunia ekonomi, baik sebagai pengusaha, pekerja, maupun penggerak usaha mikro kecil menengah (UMKM), turut menopang ketahanan ekonomi nasional dengan menciptakan kemandirian dan ketangguhan ekonomi keluarga maupun masyarakat. Dari sisi kesehatan, keterlibatan perempuan dalam profesi tenaga medis, perawat, dan aktivis kesehatan masyarakat sangat krusial, terutama ketika bangsa menghadapi ancaman non-tradisional yang membuktikan bahwa ketahanan nasional tidak hanya soal militer, tetapi juga ketangguhan kesehatan masyarakat.¹⁷

Selain itu, partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan juga memiliki implikasi langsung terhadap ketahanan nasional. Representasi perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif memungkinkan lahirnya kebijakan yang lebih responsif gender, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.¹⁸ Hal ini penting karena kebijakan yang tidak sensitif gender berpotensi melemahkan ketahanan nasional akibat tidak terakomodasinya kepentingan sebagian besar warga negara, mengingat perempuan merupakan hampir setengah dari populasi Indonesia. Dengan kata lain, memperkuat keterwakilan perempuan dalam pengambilan

¹⁶ Priscilla, Margaretha Hanita, and Eko Daryanto. "Mengintegrasikan Peran Gender Dalam Analisis Intelijen Strategis: Partisipasi Perempuan Dalam Kelompok Teroris Di Indonesia." *Journal of Syntax Literate* 8, no. 7 (2023).

¹⁷ Larashati. "Ketimpangan dan peningkatan kesetaraan gender dalam SDGs (Sustainable Development Goals)." *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)* 4, no. 2 (2022).

¹⁸ Luhjingga Panasari Urbaningrum. "'Kontestasi' Perempuan dalam Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Provinsi Papua Barat Tahun 2022." *Jurnal El-Hamra: Kependidikan dan Kemasyarakatan* 8, no. 3 (2023): 144-152.

keputusan politik adalah langkah strategis untuk memastikan ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Namun, partisipasi perempuan dalam ketahanan nasional tidak dapat dilepaskan dari tantangan struktural dan kultural. Secara struktural, keterbatasan regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme keterlibatan perempuan dalam sektor pertahanan masih menjadi hambatan. Meski ada komitmen normatif terhadap kesetaraan gender, implementasi kebijakan sering kali tidak konsisten dan masih dipengaruhi bias gender. Sementara itu, secara kultural, persepsi masyarakat yang masih menempatkan perempuan dalam ranah domestik mempersempit ruang gerak perempuan untuk berpartisipasi di sektor publik, termasuk dalam bidang pertahanan.¹⁹ Budaya patriarki yang mengakar kuat sering kali menimbulkan diskriminasi, stereotip, dan resistensi terhadap keterlibatan perempuan di ruang-ruang strategis.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, reformasi hukum tata negara harus diarahkan pada penguatan kebijakan afirmatif yang menjamin keterwakilan perempuan dalam sektor pertahanan. Hal ini dapat diwujudkan melalui regulasi yang memberikan akses setara terhadap pendidikan dan pelatihan militer, serta peluang karier yang adil bagi perempuan di institusi pertahanan. Kedua, perlu adanya transformasi budaya yang mendorong masyarakat untuk mengakui dan menghargai kontribusi perempuan dalam menjaga ketahanan nasional.²⁰ Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan publik, kampanye kesetaraan gender, serta pemberdayaan komunitas perempuan dalam berbagai bidang. Ketiga, sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional harus terus ditingkatkan guna menciptakan ekosistem yang kondusif bagi partisipasi perempuan.

Dalam perspektif ketahanan nasional modern, keterlibatan perempuan tidak hanya dilihat sebagai kewajiban moral atau implementasi dari prinsip kesetaraan gender, melainkan juga sebagai strategi praktis untuk memperkuat daya tahan bangsa. Perempuan memiliki potensi unik, seperti kemampuan membangun jaringan sosial, kepedulian terhadap aspek kemanusiaan, serta keuletan dalam menghadapi tantangan.²¹ Potensi ini sangat relevan dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti radikalisme,

¹⁹ Nurdin. "Memahami Isu Gender Dan Ketidaksetaraan Gender Di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan." *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 1 (2024): 332-343.

²⁰ Mariata Yati and Rosyadi Rosyadi. "Pengaruh Ketimpangan Gender dan Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat." *Journal of Economics and Business UBS* 14, no. 1 (2025): 81-99.

²¹ Triyono, Tarsisius Susilo, Tedy Basuki, and Andy Mustafa Akad. "Studi Kualitatif Tentang Respons Hukum Internasional Terhadap Kekerasan Gender dalam Konflik Bersenjata." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 2 (2025): 183-193.

terorisme, bencana alam, hingga krisis lingkungan. Dengan demikian, memperluas partisipasi perempuan dalam ketahanan nasional adalah langkah penting untuk membangun resiliensi bangsa yang holistik.

Perempuan berpotensi menghadirkan pendekatan yang lebih humanis, empatik, dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat sipil, terutama dalam situasi krisis kemanusiaan, operasi perdamaian, maupun diplomasi pertahanan. Misalnya, dalam konteks misi pemeliharaan perdamaian PBB, kontribusi personel perempuan terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat lokal, khususnya dalam komunitas yang rentan terhadap kekerasan seksual atau diskriminasi berbasis gender.²² Dengan demikian, rendahnya representasi perempuan dalam pertahanan nasional bukan hanya persoalan keadilan gender, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang dapat mengurangi efektivitas pertahanan.

Hambatan utama yang menyebabkan keterpinggiran perempuan dalam pertahanan nasional bersifat ganda, yaitu kultural dan struktural.²³

a. Hambatan Kultural

Dalam masyarakat Indonesia, konstruksi sosial yang patriarkis masih memandang perempuan sebagai pihak kedua yang lebih cocok berada dalam ranah domestik. Stereotip gender ini membatasi kesempatan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam sektor pertahanan. Perempuan sering dianggap tidak memiliki kapasitas fisik maupun psikologis yang memadai untuk menghadapi tantangan dunia militer. Padahal, banyak penelitian menunjukkan bahwa efektivitas seorang pemimpin atau personel pertahanan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan emosional, keterampilan komunikasi, dan kemampuan manajemen konflik dimensi yang justru sering lebih kuat dimiliki Perempuan.

b. Hambatan Struktural

Dari aspek struktural, regulasi hukum yang ada belum sepenuhnya menjamin kesetaraan. Misalnya, aturan terkait rekrutmen, penempatan, dan promosi dalam struktur TNI belum mengakomodasi prinsip kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984.

Akibatnya, perempuan yang ingin berkarier di sektor pertahanan sering kali menghadapi diskriminasi dalam proses seleksi maupun akses terhadap posisi strategis.

²² Aris Sarjito and Guntur Eko Saputro. "Interseksionalitas Pemikiran Strategis Dan Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti." *Jurnal Governansi* 10, no. 1 (2024): 87-114.

²³ Fenta Annastasya. "Tinjauan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Papua Tahun 2017-2021." (2024): 85-98.

Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun perempuan mampu menempuh pendidikan militer dengan prestasi tinggi, peluang mereka untuk menduduki jabatan penting seringkali lebih kecil dibandingkan rekan laki-laki.

Agar partisipasi perempuan dalam sektor pertahanan dapat terjamin, diperlukan reformasi hukum tata negara yang komprehensif. Reformasi tersebut harus meliputi:²⁴

- a. Amandemen regulasi yang secara eksplisit menegaskan kesetaraan gender dalam sektor pertahanan. Regulasi seperti UU TNI dan UU Pertahanan perlu memasukkan klausul mengenai keterwakilan perempuan serta mekanisme perlindungan dari diskriminasi.
- b. Kebijakan afirmatif untuk meningkatkan representasi perempuan, misalnya melalui kuota kepemimpinan di tubuh TNI atau lembaga pertahanan lainnya. Afirmasi sementara ini sesuai dengan prinsip keadilan substantif yang juga dianjurkan dalam doktrin hukum tata negara.
- c. Harmonisasi instrumen hukum internasional, khususnya CEDAW, dengan hukum nasional agar lebih operasional dalam praktik ketatanegaraan. Selama ini, ratifikasi perjanjian internasional belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi konkret di lapangan.
- d. Pendidikan dan sosialisasi gender mainstreaming di lingkungan militer dan lembaga pertahanan untuk menghapus bias kultural. Pelatihan ini penting agar perspektif gender tidak hanya menjadi jargon, tetapi juga bagian dari budaya organisasi.²⁵

2. Kontribusi Perempuan terhadap Reformasi Pertahanan

Kontribusi perempuan dalam reformasi pertahanan merupakan isu penting yang semakin mendapatkan perhatian dalam diskursus akademik dan kebijakan publik. Dalam konteks pembangunan ketahanan nasional, keterlibatan perempuan tidak hanya dipandang sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia dan kesetaraan gender, melainkan juga sebagai strategi untuk memperkuat legitimasi, efektivitas, serta inklusivitas sistem pertahanan suatu negara. Merujuk pada tabel 2 kontribusi perempuan untuk mengetahui segala potensi kontribusi perempuan terhadap reformasi pertahanan di Indonesia.

Tabel 2. Kontribusi Perempuan Terhadap Reformasi Pertahanan

Aspek Kontribusi	Kontribusi Perempuan
------------------	----------------------

²⁴ Rr Yunita, Fathiya Nabila, and Abdul Aziz. "Analisis yuridis kesetaraan gender dalam perspektif hukum dan pembangunan nasional." *Jurnal Literasi Hukum* 4, no. 2 (2020): 78-89.

²⁵ Noriana Puspitasari, and Rio Sundari. "Analisis Program Gender And Employment Oleh International Labor Organization (ILO) Dalam Pekerjaan Dan Upah Di Korea Selatan Tahun 2022-2024." *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 11, no. 2 (2025): 284-298.

Peran Langsung dalam Pertahanan	Ikut serta dalam militer, lembaga pertahanan, dan posisi strategis negara.
Peran Tidak Langsung dalam Pertahanan	Menguatkan diplomasi, pendidikan, kesehatan, dan budaya damai di masyarakat.
Keterlibatan di Bidang Militer	Memberikan perspektif baru dalam strategi militer dan menghadapi ancaman non-tradisional.
Keterlibatan dalam Kebijakan & Reformasi Hukum	Mendorong kebijakan pertahanan yang inklusif, humanis, dan berbasis kebutuhan rentan.
Transformasi Budaya & Organisasi Pertahanan	Mengurangi diskriminasi struktural, mendorong kebijakan afirmatif, dan menciptakan pelatihan setara.
Diplomasi Pertahanan	Memperkuat komunikasi lintas budaya, resolusi konflik damai, dan jaringan kerja sama internasional.
Pembangunan Ketahanan Sosial	Membangun generasi tangguh melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Kesetaraan Gender & Norma Internasional	Meningkatkan citra internasional negara melalui implementasi CEDAW dan Resolusi PBB 1325.
Tantangan Struktural	Minim regulasi afirmatif, keterbatasan anggaran, hambatan rekrutmen dan promosi.
Tantangan Kultural	Stereotip gender, bias patriarki, dan anggapan pertahanan sebagai domain maskulin.
Implikasi Strategis	Meningkatkan adaptivitas, legitimasi kebijakan, dan memperluas dimensi pertahanan.
Transformasi Budaya Organisasi	Menciptakan organisasi yang inklusif, profesional, dan berbasis meritokrasi.
Konteks Indonesia	Potensi besar dengan jumlah perempuan signifikan, perlu reformasi hukum tata negara. ²⁶

Sumber: diolah peneliti, 2025

Secara historis, perempuan sering ditempatkan pada posisi marginal dalam struktur pertahanan, baik dari segi representasi kelembagaan maupun pengambilan keputusan strategis. Namun, perkembangan sosial, politik, dan hukum dewasa ini mendorong adanya reformasi yang menekankan peran perempuan sebagai aktor penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pertahanan.²⁷ Hal ini menjadi dasar penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kontribusi perempuan dapat memberikan dampak signifikan terhadap reformasi pertahanan dalam perspektif multidimensional.

Secara sosiologis, keterlibatan perempuan dalam pertahanan negara dapat dilihat melalui dua aspek utama, yakni peran langsung dan peran tidak langsung. Peran langsung

²⁶ Nanik Mandasari. "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender." *Economics, Business, Management, & Accounting Journal (Ebisma)* 3, no. 2 (2023): 133-143.

²⁷ Ali Zhafir Talmullah, Nurmasari Situmeang, and Asep Kamaluddin Nasir. "Relevansi Feminisme Dalam Isu Kontemporer: Kehadiran Un Women Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Manusia Di Afghanistan." *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 7, no. 1 (2024): 104-121.

mencakup keikutsertaan perempuan dalam militer, lembaga pertahanan, dan posisi strategis dalam pemerintahan yang berkaitan dengan keamanan nasional. Sementara itu, peran tidak langsung meliputi keterlibatan perempuan dalam diplomasi, penguatan masyarakat sipil, pembangunan pendidikan, serta penciptaan budaya damai yang memperkuat ketahanan nasional.²⁸ Dalam kerangka reformasi pertahanan, kedua bentuk kontribusi ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, karena pertahanan bukan hanya soal kekuatan militer, melainkan juga soal kohesi sosial dan legitimasi politik.

Di bidang militer, perempuan telah menunjukkan peran penting dalam mengubah paradigma pertahanan yang sebelumnya bersifat maskulin dan hierarkis. Keterlibatan perempuan dalam angkatan bersenjata tidak hanya menambah jumlah personel, tetapi juga memperkaya perspektif dalam perencanaan strategi, terutama dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti terorisme, bencana alam, krisis kemanusiaan, dan keamanan siber. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa pasukan yang melibatkan perempuan dalam misi perdamaian PBB lebih berhasil dalam membangun kepercayaan dengan masyarakat lokal, khususnya perempuan dan anak-anak, dibandingkan dengan pasukan yang didominasi laki-laki.²⁹ Hal ini memperlihatkan bahwa reformasi pertahanan yang inklusif terhadap gender dapat meningkatkan efektivitas operasional serta memperluas legitimasi internasional suatu negara.

Selain kontribusi dalam aspek militer, perempuan juga berperan besar dalam ranah kebijakan dan reformasi hukum tata negara yang mengatur sistem pertahanan. Kehadiran perempuan dalam parlemen dan lembaga legislatif memungkinkan lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu gender dan keamanan manusia. Dengan perspektif yang berbeda dari laki-laki, perempuan cenderung mengedepankan pendekatan yang lebih inklusif, berbasis dialog, serta berorientasi pada kebutuhan kelompok rentan dalam merumuskan kebijakan pertahanan. Reformasi pertahanan yang dipengaruhi oleh perspektif perempuan akan lebih memperhatikan keseimbangan antara hard power (kekuatan militer) dan soft power (diplomasi, pembangunan sosial, dan budaya damai).³⁰ Dengan demikian, kontribusi perempuan dalam sektor legislasi memperkuat arah reformasi pertahanan agar lebih humanis, adil, dan berkelanjutan.

²⁸ Tiffany D., and Diana Z. O'brien. "Defending the realm: The appointment of female defense ministers worldwide." *American Journal of Political Science* 62, no. 2 (2018): 355-368.

²⁹ Eleanor Gordon. "Gender and defence sector reform: problematising the place of women in conflict-affected environments." *Journal of intervention and statebuilding* 13, no. 1 (2019): 75-94.

³⁰ Donà Alessia. "Gender equality in the Italian Recovery and Resilience Plan: The depoliticizing effects of the technocratic Draghi government." *Contemporary Italian Politics* 14, no. 4 (2022): 458-471.

Di samping itu, reformasi pertahanan juga menuntut transformasi budaya dan struktur organisasi yang lebih inklusif terhadap perempuan. Tantangan terbesar yang sering dihadapi perempuan dalam sektor pertahanan adalah diskriminasi struktural, stereotip gender, dan keterbatasan akses terhadap posisi strategis. Reformasi pertahanan yang melibatkan perempuan meniscayakan adanya revisi regulasi, penyusunan kebijakan afirmatif, dan pembangunan sistem pelatihan yang setara. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan partisipasi perempuan secara kuantitatif, tetapi juga meningkatkan kualitas kontribusi mereka dalam pengambilan keputusan.³¹ Dengan membuka ruang yang lebih luas, perempuan dapat memimpin perubahan budaya organisasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman, termasuk dalam menghadapi ancaman multidimensi yang membutuhkan pendekatan non-militer.

Kontribusi perempuan juga tampak dalam konteks diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan adalah instrumen penting dalam hubungan internasional yang bertujuan membangun kepercayaan, mencegah konflik, dan memperkuat kerja sama antarnegara. Kehadiran perempuan dalam ranah diplomasi pertahanan memberikan nuansa yang lebih persuasif dan dialogis. Perempuan diplomat atau pejabat pertahanan cenderung lebih berhasil dalam membangun komunikasi lintas budaya dan mengedepankan resolusi konflik secara damai.³² Dalam kerangka reformasi pertahanan, diplomasi berbasis gender ini memberikan kontribusi besar dalam memperluas jaringan kerja sama internasional serta memperkuat posisi negara di kancah global.

Dari perspektif pembangunan masyarakat, kontribusi perempuan dalam reformasi pertahanan juga terkait dengan peran mereka sebagai agen sosial yang membentuk ketahanan non-militer. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial adalah sektor-sektor yang sangat dipengaruhi oleh keterlibatan perempuan. Reformasi pertahanan yang modern tidak hanya berbicara tentang pertahanan fisik dari serangan luar, tetapi juga tentang ketahanan sosial dari dalam negeri. Perempuan sebagai penggerak di sektor pendidikan dan kesehatan berkontribusi besar dalam membentuk generasi yang tangguh, sehat, dan memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat.³³ Dengan demikian, reformasi pertahanan yang melibatkan perempuan pada level komunitas akan memperkuat ketahanan nasional dari akar rumput.

³¹ Liu Zewei, and Zurong Liang. "Gender equality, human development, and financial resilience: Country-level mediating pathways and international implications." *International Social Work* (2025): 00208728251355376.

³² Juncos Ana E and Philippe Bourbeau. "Resilience, gender, and conflict: thinking about resilience in a multidimensional way." *Journal of International Relations and Development* 25, no. 4 (2022): 861-878.

³³ Ibid.

Kontribusi perempuan terhadap reformasi pertahanan juga berhubungan erat dengan agenda kesetaraan gender global. Instrumen internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam seluruh aspek perdamaian dan keamanan. Implementasi resolusi ini di tingkat nasional mendorong reformasi pertahanan untuk membuka ruang partisipasi perempuan secara lebih luas.³⁴ Dengan adanya keterikatan pada norma internasional, kontribusi perempuan dalam reformasi pertahanan tidak hanya memberikan dampak domestik, tetapi juga meningkatkan citra internasional negara sebagai aktor yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan gender.

Namun, perlu diakui bahwa kontribusi perempuan dalam reformasi pertahanan menghadapi tantangan besar yang bersifat struktural maupun kultural. Tantangan struktural meliputi keterbatasan regulasi yang berpihak pada kesetaraan gender, minimnya alokasi anggaran untuk program pemberdayaan perempuan di sektor pertahanan, serta hambatan dalam rekrutmen dan promosi. Sementara itu, tantangan kultural mencakup stereotip gender yang masih melekat kuat dalam masyarakat, yang memandang sektor pertahanan sebagai domain maskulin.³⁵ Reformasi pertahanan yang mengakomodasi kontribusi perempuan menuntut perubahan paradigma, baik pada level institusi maupun masyarakat luas, agar kesetaraan gender benar-benar menjadi nilai yang terinternalisasi.

Dalam jangka panjang, kontribusi perempuan terhadap reformasi pertahanan memiliki implikasi strategis yang signifikan. Pertama, reformasi yang inklusif terhadap gender akan menghasilkan sistem pertahanan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan ancaman non-tradisional. Kedua, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pertahanan akan meningkatkan legitimasi kebijakan publik dan memperkuat demokrasi. Ketiga, kontribusi perempuan akan memperluas dimensi pertahanan, tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berhubungan.³⁶ Dengan kata lain, reformasi pertahanan yang melibatkan perempuan bukan sekadar isu representasi, tetapi merupakan strategi substantif untuk membangun ketahanan nasional yang lebih kokoh.

³⁴ Ibid.

³⁵ Barbara Martini and Marco Platania. "Are the regions with more gender equality the more resilient ones? An analysis of the Italian regions." *Regional Science Inquiry* 14, no. 2 (2022): 71-94.

³⁶ Helen Idowu Adhuzé and Morounmubo Deborah Ogunbona. "Gender Equality and Sustainable Development: A Pathway to Inclusive and Resilient Societies." *Concrescence Journal Of Multi-Disciplinary Research* 2, no. 2 (2025).

Lebih lanjut, kontribusi perempuan dalam reformasi pertahanan juga membawa dampak positif pada transformasi budaya organisasi di sektor militer dan keamanan. Kehadiran perempuan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih profesional, inklusif, dan berbasis meritokrasi.³⁷ Penelitian menunjukkan bahwa unit pertahanan yang lebih beragam secara gender memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal inovasi, manajemen konflik, dan efektivitas komunikasi. Dengan demikian, partisipasi perempuan tidak hanya memperbaiki citra institusi pertahanan, tetapi juga meningkatkan kinerja dan efektivitas operasional secara nyata.

Dalam konteks Indonesia, kontribusi perempuan terhadap reformasi pertahanan juga semakin relevan. Dengan jumlah penduduk perempuan yang hampir setara dengan laki-laki, partisipasi perempuan dalam sektor pertahanan menjadi potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Kehadiran perempuan di TNI, Polri, Kementerian Pertahanan, serta lembaga diplomasi sudah menunjukkan perkembangan, meskipun masih menghadapi kendala struktural dan budaya. Reformasi hukum tata negara yang lebih berpihak pada kesetaraan gender menjadi kunci untuk membuka peluang lebih luas bagi perempuan berkontribusi dalam sektor pertahanan. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat ketahanan nasionalnya melalui strategi pertahanan yang berbasis pada prinsip inklusivitas dan keadilan gender.

Pendekatan ini terbukti meningkatkan legitimasi kebijakan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan. Norwegia bahkan menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan wajib militer universal berbasis gender pada 2016, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki kewajiban yang sama untuk berkontribusi pada ketahanan nasional. Jika Indonesia mampu mengadopsi kebijakan serupa, maka ketahanan nasional akan semakin kokoh. Partisipasi perempuan bukan hanya bentuk keadilan sosial, tetapi juga merupakan strategi efektif dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti krisis kemanusiaan, bencana alam, maupun konflik horizontal. Dalam kasus bencana alam di Indonesia, misalnya, keterlibatan perempuan dalam tim evakuasi dan pemulihan terbukti lebih efektif dalam menjangkau kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyintas kekerasan berbasis gender.

C. Kesimpulan

Ketahanan nasional Indonesia masih didominasi oleh perspektif militeristik, sehingga peran perempuan dalam sektor pertahanan cenderung terpinggirkan. Padahal, partisipasi perempuan memiliki kontribusi strategis dalam memperluas perspektif kebijakan, memperkuat

³⁷ Ibid.

legitimasi negara, serta meningkatkan efektivitas pertahanan nasional. Hambatan partisipasi perempuan dalam pertahanan nasional disebabkan oleh faktor kultural (patriarki dan stereotip gender) serta struktural (keterbatasan regulasi dan minimnya kebijakan afirmatif). Hal ini mengakibatkan akses perempuan terhadap posisi strategis di lembaga pertahanan masih terbatas. Pengalaman internasional (misalnya Kanada, Norwegia, dan Jerman) menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pertahanan dapat memperkuat legitimasi kebijakan, memperluas strategi keamanan, dan meningkatkan ketahanan negara. Hal ini menjadi bukti bahwa kesetaraan gender merupakan kebutuhan strategis, bukan sekadar tuntutan normatif. Untuk mewujudkan ketahanan nasional yang inklusif, diperlukan reformasi hukum tata negara melalui pembaruan regulasi, penguatan kebijakan afirmatif, harmonisasi instrumen internasional seperti CEDAW dengan hukum nasional, serta internalisasi nilai kesetaraan gender di lingkungan militer dan pertahanan.

Referensi

- Adhuze, H. I., & Ogunbona, M. D. (2025). Gender Equality and Sustainable Development: A Pathway to Inclusive and Resilient Societies. *Concrescence Journal Of Multi-Disciplinary Research*, 2(2).
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980.
- Aflah, M. N., & Mawaddah, L. R. (2021). Pengaruh Glass Ceiling Terhadap Kepemimpinan Strategis Wanita Dalam Bidang Militer Di Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 4(2), 4.
- Annastasya, F. (2024). Tinjauan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Papua Tahun 2017-2021.
- Barnes, T. D., & O'brien, D. Z. (2018). Defending the realm: The appointment of female defense ministers worldwide. *American Journal of Political Science*, 62(2), 355-368.
- Donà, A. (2022). Gender equality in the Italian Recovery and Resilience Plan: The depoliticizing effects of the technocratic Draghi government. *Contemporary Italian Politics*, 14(4), 458-471.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, kajian ilmiah mata kuliah umum*, 21(1), 33-54.
- Gordon, E. (2019). Gender and defence sector reform: problematising the place of women in conflict-affected environments. *Journal of intervention and statebuilding*, 13(1), 75-94.
- Habibie, S. Y., Saragih, H. J. R., & Suwarno, P. (2024). Budaya Kepemimpinan Strategis Dalam Menghadapi Ancaman Non Tradisional Di Indonesia Melalui Peningkatan Partisipasi Perempuan Pesisir. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(8), 3290-3303.
- Harjanti, P., Hanita, M., & Daryanto, E. (2023). Mengintegrasikan Peran Gender Dalam Analisis Intelijen Strategis: Partisipasi Perempuan Dalam Kelompok Teroris Di Indonesia. *Journal of Syntax Literate*, 8(7).
- Jannah, I., & Marzaniar, P. (2025). Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Rekrutmen dan Promosi Jabatan Struktural Pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

- Aceh. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 20(1), 1-26.
- Juncos, A. E., & Bourbeau, P. (2022). Resilience, gender, and conflict: thinking about resilience in a multidimensional way. *Journal of International Relations and Development*, 25(4), 861-878.
- Kansil, C. S., Prawira, M., & Martono, H. K. (2021). Pertahanan negara dan gender wanita di masa pandemi covid19 di Indonesia. *Prosiding Serina*, 1(1), 549-566.
- Kristiyanto, H., Yugianoro, P., Octavian, A., & Midhio, I. W. (2022). Kepemimpinan Strategis dalam Perspektif Gender. *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 149-164.
- Larashati, L. (2022). Ketimpangan dan peningkatan kesetaraan gender dalam SDGs (Sustainable Development Goals). *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4(2).
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). Peran Gender Perempuan Dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Demi Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Di Tingkat Global. *JIDE: Journal Of International Development Economics*, 2(01), 50-74.
- Liu, Z., & Liang, Z. (2025). Gender equality, human development, and financial resilience: Country-level mediating pathways and international implications. *International Social Work*.
- Mandasari, N. (2023). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Economics, Business, Management, & Accounting Journal (Ebisma)*, 3(2), 133-143.
- Martini, B., & Platania, M. (2022). Are the regions with more gender equality the more resilient ones? An analysis of the Italian regions. *Regional Science Inquiry*, 14(2), 71-94.
- Masruchiyah, N., & Laratmase, A. J. (2023). Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 12(2), 125-138.
- Maysarah, M. M., Sjamsoeddin, S., Samudro, E. G., & Wahyudi, B. (2024). Akselerasi Agenda Women, Peace, and Security (WPS) dalam Pembangunan Nasional untuk Pertahanan Negara. *Civil and Military Cooperation Journal*, 1(1), 1-10.
- Nurdin, N. (2024). Memahami Isu Gender Dan Ketidaksetaraan Gender Di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 332-343.
- Permata, A., Ginting, E., & Apriani, R. (2025). Politik Gender dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Midar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(3), 438-453.
- Puspandari, R. Y., Nabila, F., & Aziz, A. (2020). Analisis yuridis kesetaraan gender dalam perspektif hukum dan pembangunan nasional. *Jurnal Literasi Hukum*, 4(2), 78-89.
- Puspitasari, N., & Sundari, R. (2025). Analisis Program Gender And Employment Oleh International Labor Organization (ILO) Dalam Pekerjaan Dan Upah Di Korea Selatan Tahun 2022-2024. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 11(2), 284-298.
- Rumbekwan, M., & Tanamal, N. A. (2022). Peran Perempuan Dalam Ketahanan Nasional. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 203-212.
- Sarjito, A., & Saputro, G. E. (2024). Interseksionalitas Pemikiran Strategis Dan Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti. *Jurnal Governansi*, 10(1), 87-114.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Triyono, T., Susilo, T., Basuki, T., & Akad, A. M. (2025). Studi Kualitatif Tentang Respons

- Hukum Internasional Terhadap Kekerasan Gender dalam Konflik Bersenjata. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(2), 183-193.
- Urbaningrum, L. P. (2023). "Kontestasi" Perempuan dalam Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Provinsi Papua Barat Tahun 2022. *Jurnal El-Hamra: Kependidikan dan Kemasyarakatan*, 8(3), 144-152.
- Utama, A. S., Lubis, A. F., Milia, J., & Warmayana, I. G. A. K. (2024). Sistem Politik Berkeadilan Pancasila: Upaya Nyata Peningkatan Ketahanan Hukum Nasional. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(7), 2500-2509.
- Yam, J. H. (2024). Kajian penelitian: Tinjauan literatur sebagai metode penelitian. *Jurnal Empire*, 4(1), 61-70.
- Yati, M., & Rosyadi, R. (2025). Pengaruh Ketimpangan Gender dan Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat. *Journal of Economics and Business UBS*, 14(1), 81-99.
- Zhafir, A. Z. T., Situmeang, N., & Nasir, A. K. (2024). Relevansi Feminisme Dalam Isu Kontemporer: Kehadiran Un Women Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Manusia Di Afghanistan. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(1), 104-121.